



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

TAHUN 2025



KKP
2025
#RISETOGETHER

**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPBAP Ujung Batee Triwulan I Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada BPBAP Ujung Batee dalam kurun waktu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi BPBAP Ujung Batee dan menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Aceh Besar, 17 April 2025



Manijo, S.St.Pi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Sumber Daya Manusia	3
1.5. Potensi dan Permasalahan Perikanan Budidaya	5
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	6
BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	8
2.1. Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	8
2.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	9
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2. Analisis Capaian Kinerja	14
1. SK-1: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	14
2. SK-2: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	15
3. SK-3: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	24
4. SK-4: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPBAP Ujung Batee.....	27
3.3. Kinerja Anggaran.....	41
BAB 4. PENUTUP	44



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumberdaya Manusia Status PNS Berdasarkan Jabatan.....	3
Tabel 2. Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	8
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025.....	12
Tabel 4. Capaian Indikator: Sarana budidaya yang disalurkan ke masyarakat.....	14
Tabel 5. Capaian Indikator: Produksi calon induk unggul ikan air payau.....	15
Tabel 6. Capaian Indikator: Produksi calon induk unggul udang.....	16
Tabel 7. Capaian Indikator: Benih ikan air payau yang disalurkan.....	17
Tabel 8. Capaian Indikator: Benih udang yang disalurkan.....	19
Tabel 9. Capaian Indikator: Pakan ikan air payau yang diproduksi.....	20
Tabel 10. Capaian Indikator: Sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium	21
Tabel 11. Jumlah sampel pengujian berdasarkan ruang lingkup uji.....	21
Tabel 12. Capaian Indikator: Sampel pakan dan obat ikan yang diuji.....	22
Tabel 13. Capaian Indikator: Pengujian antimikrobal resisten.....	23
Tabel 14. Capaian Indikator: Produksi calon induk unggul ikan air payau.....	24
Tabel 15. Capaian Indikator: Benih ikan air laut yang disalurkan.....	25
Tabel 16. Capaian Indikator: Diseminasi teknologi pembesaran ikan.....	27
Tabel 17. Capaian Indikator: Nilai penilaian mandiri SAKIP.....	28
Tabel 18. Capaian Indikator: Indeks profesionalitas ASN.....	29
Tabel 19. Capaian Indikator: Persentase penyelesaian temuan BPK.....	30
Tabel 20. Capaian Indikator: Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan.....	31
Tabel 21. Capaian Indikator: Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk menuju WBK....	33
Tabel 22. Capaian Indikator: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	34
Tabel 23. Capaian Indikator: Nilai kinerja perencanaan anggaran.....	35
Tabel 24. Capaian Indikator: Indeks pengelolaan SDM.....	36
Tabel 25. Capaian Indikator: Pelayanan keterbukaan informasi publik.....	37
Tabel 26. Capaian Indikator: Persentase layanan perkantoran.....	38
Tabel 27. Capaian Indikator: Nilai pengawasan kearsipan internal.....	39



Tabel 28. Capaian Indikator: Persentase penyelesaian SOP.....	40
Tabel 29. Pagu anggaran tahun 2021-2025	41
Tabel 30. Kendala dan rencana aksi triwulan I 2025	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPBAP Ujung Batee	3
Gambar 2. Pegawai BPBAP Ujung Batee berdasarkan jabatan	4
Gambar 3. Pegawai BPBAP Ujung Batee berdasarkan tingkat pendidikan	4
Gambar 4. Potensi Perikanan Budidaya	5
Gambar 5. <i>Screenshot</i> Nilai Kinerja Triwulan I Tahun 2025	11
Gambar 6. Alokasi jenis belanja dan sumber dana belanja tahun 2025	42
Gambar 7. Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2021-2025	42
Gambar 8. Target dan Realisasi PNBPN Tahun 2021-2025	43



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPBAP Ujung Batee Triwulan I Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja telah ditetapkan 4 Sasaran Kegiatan dan 24 indikator kinerja, dan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPBAP Ujung Batee sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sesuai aplikasi "kinerjaku" adalah sebesar 117,38 %. Dari 24 indikator kinerja yang telah dilaksanakan dan dilakukan pengukuran capaian terdapat 7 indikator telah mencapai target yaitu:

1. Benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 110 %
2. Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 234,67 %
3. Sampel pakan dan obat ikan yang diuji Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 150 %
4. Pengujian antimicrobial resistance Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 233,33 %
5. Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 480 %
6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 109,25 %
7. Persentase layanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 125 %

Sementara itu indikator kinerja belum ada capaian karena tidak ada target di Triwulan I 2025 yaitu:

1. Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Unit)
2. Produksi calon induk unggul ikan air payau untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)
3. Produksi calon induk unggul udang untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)
4. Benih udang yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Ekor)
5. Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Kg)
6. Produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)
7. Diseminasi teknologi pembesaran ikan Satker BPBAP Ujung Batee (Orang)
8. Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)



9. Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee (Indeks)
10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)
11. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)
12. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)
13. Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)
14. Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee (Indeks)
15. Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)
16. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)
17. Persentase penyelesaian SOP Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)

Pencapaian terhadap beberapa indikator kinerja pada periode selanjutnya perlu senantiasa dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta kerja keras pada beberapa kegiatan pendukung indikator kinerja dimaksud serta melakukan penyempurnaan kebijakan internal yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja. Dengan demikian, diharapkan di masa yang akan datang dapat terjadi peningkatan capaian kinerja yang lebih optimal melalui kegiatan-kegiatan pendukung yang dilakukan secara efektif dan efisien.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, telah mengamanatkan untuk terus melakukan pembangunan perikanan budidaya secara berkelanjutan, karena diyakini dengan potensi dan kekuatan yang ada, perikanan budidaya mampu memberi kontribusi pada misi Asta Cita pemerintah, diantaranya mewujudkan Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Penjabaran pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya, lebih lanjut dituangkan dalam buku Rencana Strategi (RENSTRA) Perikanan Budidaya 2025-2029.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam beberapa perspektif dengan masing-masing indikator kinerja seperti yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Balai Budidaya Perikanan Air Payau Ujung Batee (BPBAP) Ujung Batee. Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BPBAP Ujung Batee Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan

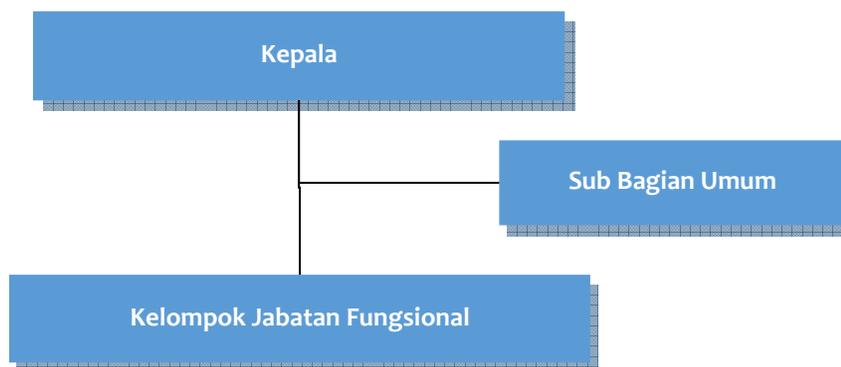
kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budidaya kedepan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya, disebutkan bahwa tugas Balai Budidaya Perikanan Air Payau (salah satunya BPBAP Ujung Batee) adalah ***“melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya air payau”***. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPBAP Ujung Batee mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budidaya air payau;
2. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air payau;
3. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air payau;
4. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau;
5. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air payau;
6. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air payau;
7. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air payau;
8. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air payau;
9. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air payau;
10. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air payau; dan
11. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau terdiri atas: a) Subbagian Umum; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



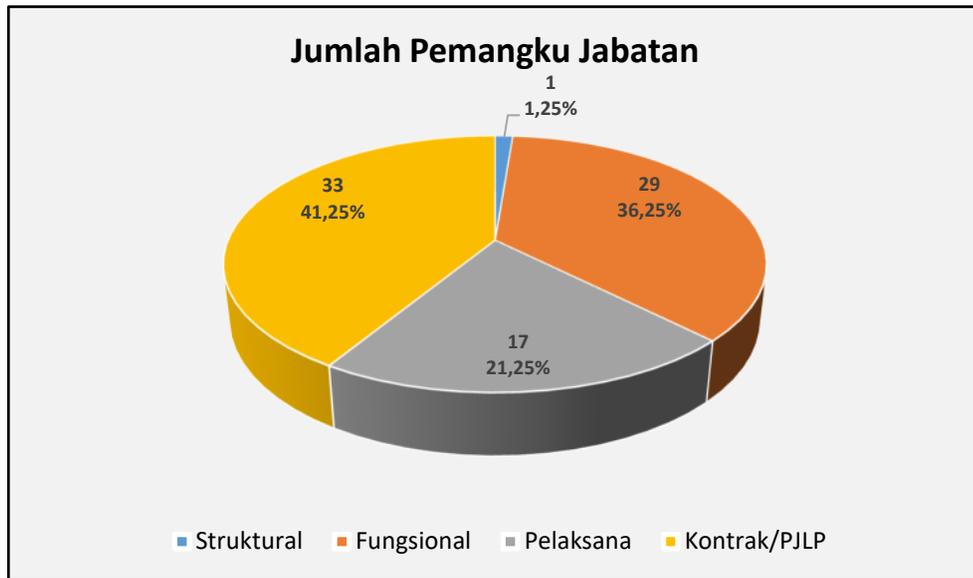
Gambar 1. Struktur Organisasi BPBAP Ujung Batee

1.4. Sumber Daya Manusia

Total keseluruhan pegawai BPBAP Ujung Batee sebanyak 80 orang, dengan rincian status PNS sebanyak 41 orang, PPPK sebanyak 6 orang dan tenaga kontrak/PJLP sebanyak 33 orang. Pegawai berstatus PNS didominasi oleh fungsional tertentu sebanyak 29 orang, sementara pelaksana hanya sebanyak 17 orang, dan pejabat struktural 1 orang.

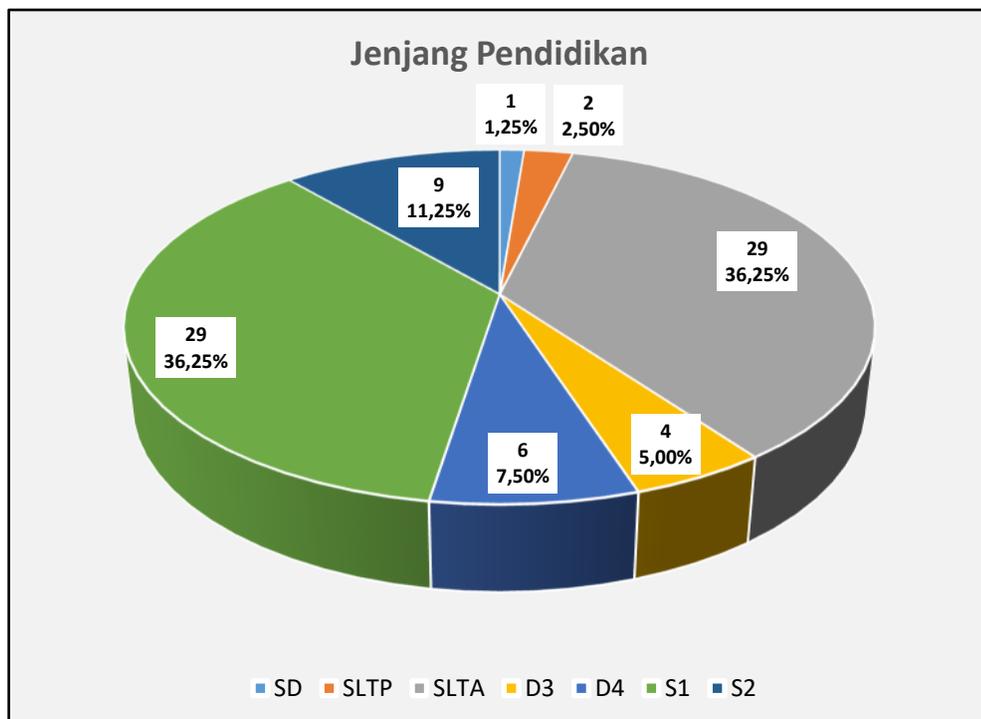
Tabel 1. Sumberdaya Manusia Status PNS Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Nama/Jenjang Jabatan	PNS (orang)	PPPK (orang)
1	Struktural	1 Kepala Balai	1	
		2 Kepala Sub Bagian Umum	-	
2	Fungsional	1 Analis Akuakultur Ahli Madya	1	
		2 Analis Akuakultur Ahli Muda	9	
		3 Analis Akuakultur Ahli Pertama	2	3
		4 Teknisi Akuakultur Mahir	4	
		5 Teknisi Akuakultur Terampil	2	
		6 Teknisi Akuakultur Pemula	-	2
		7 Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	2	
		8 Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	1	1
		9 Teknisi Kesehatan Ikan Penyelia	1	
		10 Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	1	
		11 Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	
3	Pelaksana	1 Pengelola Laboratorium	1	
		2 Teknisi Perikanan Budidaya	9	
		3 Teknisi Listrik dan Jaringan	1	
		4 Analis Tata Usaha	1	
		5 Penyusun Laporan Keuangan	1	
		6 Pengelola Keuangan	1	
		8 Pengelola Surat	1	
		9 Pengelola Barang Milik Negara	1	
		PNS dan PPPK		
Tenaga Kontrak dan PJLP				33



Gambar 2. Pegawai BPBAP Ujung Batee berdasarkan jabatan

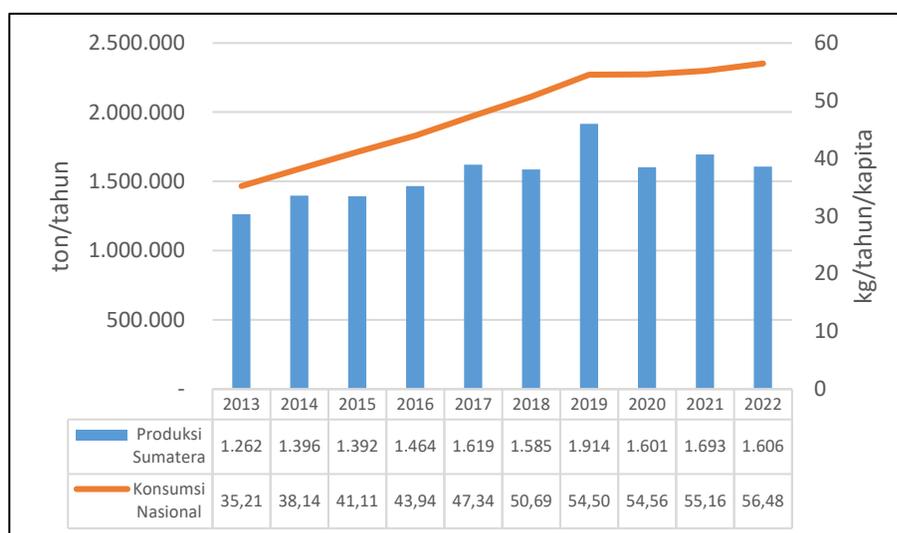
Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia BPBAP Ujung Batee adalah S2 sebanyak 9 orang (11,25 %), S1 sebanyak 29 orang (36,25 %), D4 sebanyak 6 orang (7,5 %), D3 sebanyak 4 orang (5 %), SLTA sebanyak 29 orang (36,25 %), SLTP sebanyak 2 orang (2,5 %), dan SD sebanyak 1 orang (1,25 %).



Gambar 3. Pegawai BPBAP Ujung Batee berdasarkan tingkat pendidikan

1.5. Potensi dan Permasalahan Perikanan Budidaya

Selama 10 tahun terakhir konsumsi ikan secara nasional mengalami peningkatan sebesar 60,41 %, tahun 2013 hanya 35,2 kg/tahun/kapita menjadi 56,4 kg/tahun/kapita di 2022. Sementara volume produksi perikanan budidaya untuk wilayah Sumatera (sebagai wilayah kerja BPBAP Ujung Batee) hanya meningkat sebesar 27,25 % dari tahun 2013 hanya 1,26 juta ton/tahun menjadi 1,6 juta ton/tahun di 2022, tidak mengalami peningkatan yang sebanding dengan konsumsi ikan nasional yang mencapai peningkatan sebesar 60,41 % (sumber data diolah dari <https://statistik.kkp.go.id>). Adanya ketimpangan antara kebutuhan konsumsi ikan nasional dengan volume produksi menjadi potensi bagi BPBAP Ujung Batee untuk mendukung peningkatan volume produksi, melalui penyediaan induk dan benih yang berkualitas maupun bimbingan teknis perikanan budidaya.



Gambar 4. Potensi Perikanan Budidaya

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budidaya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu permasalahan internal dan eksternal.

- a. Permasalahan internal yang dihadapi meliputi : (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budi daya; (v) pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vi) cara budidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan) belum optimal diterapkan oleh pelaku usaha perikanan budi daya; dan (vii) kondisi

- infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budi daya secara efisien.
- b. Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budi daya meliputi: (i) ruang untuk usaha perikanan budi daya belum ada kepastian memadai, (ii) regulasi dan perizinan lintas sektoral belum begitu simetrik sehingga menghambat perkembangan usaha perikanan budi daya, dan (iii) perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan.

Lebih spesifik lagi permasalahan yang dihadapi BPBAP Ujung Batee yaitu adanya ketimpangan antara sumber daya (baik SDM maupun dukungan anggaran) dengan luas wilayah kerja. Wilayah kerja BPBAP Ujung Batee mencakup seluruh Sumatera yang begitu luas. Anggaran hanya cukup mengakomodir kegiatan di Aceh dan Sumut, selain itu instalasi budi daya perikanan BPBAP Ujung Batee hanya satu dan berada di Aceh Besar, sehingga sulit untuk menjangkau wilayah Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, maupun Lampung.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, telah dirangkum beberapa kendala dan permasalahan dalam pencapaian target-target kinerja pada tahun tersebut, yaitu:

1. Sumber daya manusia: jumlah pegawai terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun baik pensiun maupun mutasi, sementara penambahan dari pengadaan CPNS/PPPK maupun dari mutasi dari instansi lain tidak sebanding.
2. Pendidikan dan latihan: ketersediaan pendidikan dan latihan masih terbatas dan kurang variatif terhadap kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
3. Sarana dan prasarana: baik gedung, kolam, maupun peralatan butuh banyak pemeliharaan, jika terus digunakan akan mempengaruhi kualitas output.
4. Kebijakan yang terus berubah: perkembangan zaman, tuntutan publik, maupun perkembangan teknologi mendorong perubahan kebijakan. Sementara untuk memenuhi hal tersebut butuh waktu sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja pada periode tersebut.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj BPBAP Ujung Batee Triwulan I Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BPBAP Ujung Batee selama kurun waktu Januari 2025 sampai dengan Maret 2025.



2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang BPBAP Ujung Batee serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi BPBAP Ujung Batee, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program BPBAP Ujung Batee pada Tahun 2025-2029, rencana kerja dan anggaran Tahun 2025, penetapan kinerja BPBAP Ujung Batee serta pengukuran/pengelolaan kinerja BPBAP Ujung Batee.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi indikator kinerja BPBAP Ujung Batee serta evaluasi dan analisis kinerja Tahun 2025. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja BPBAP Ujung Batee tahun 2025 dituangkan dalam perjanjian kinerja (sebagai mana terlampir).

Tabel 2. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1.	Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Unit)	11
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	2.	Produksi calon induk unggul ikan air payau untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)	1.379
		3.	Produksi calon induk unggul udang untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)	22.141
		4.	Benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Ekor)	794.150
		5.	Benih udang yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Ekor)	7.546.247
		6.	Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Kg)	10.991
		7.	Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBAP Ujung Batee (Sampel)	615
		8.	Sampel pakan dan obat ikan yang diuji Satker BPBAP Ujung Batee (Sampel)	8
		9.	Pengujian antimicrobial resistance Satker BPBAP Ujung Batee (Sampel)	14
		3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	10.
11.	Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Ekor)			84.586
12.	Diseminasi teknologi pembesaran ikan Satker BPBAP Ujung Batee (Orang)			300
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPBAP Ujung Batee	13.	Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	84
		14.	Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee (Indeks)	81

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	15. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	100
	16. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	85
	17. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	76
	18. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	92
	19. Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	71,5
	20. Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee (Indeks)	3
	21. Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	≥ 80
	22. Persentase layanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	80
	23. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	70
	24. Persentase penyelesaian SOP Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	65

2.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja BPBAP Ujung Batee menggunakan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*. 1) *Maximize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik; 2) *Minimize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik; dan 3) *Stabilize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. Pengukuran capaian Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/semesteran/tahunan);
2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas;
3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;
4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja lingkup BPBAP Ujung Batee) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>;



5. Status capaian Indikator Kinerja yang ada dalam aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id> ditunjukkan dengan warna: (i) hitam, kategori sangat kurang (untuk nilai <50); (ii) merah, kategori kurang (nilai 50 - <70); (iii) kuning, kategori cukup (nilai 70 - <90); (iv) hijau, kategori baik (nilai 90 - <110); dan (v) biru, kategori istimewa (nilai 110 – 120).

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau manual indikator kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implemementasi aplikasi BSC "Kinerjaku" yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi.

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budi daya pada Tahun 2025 sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPBAP Ujung Batee menitikberatkan pada 4 sasaran kegiatan dengan 24 indikator kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>, terlihat bahwa Nilai Capaian Kinerja BPBAP Ujung Batee sebesar 117,38 % yang berada dalam kategori ISTIMEWA. Artinya secara umum indikator kinerja sudah melampaui target atau capaian lebih dari seratus persen dari target.



Gambar 5. Screenshot Nilai Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Adapun rekapitulasi capaian kinerja BPBAP Ujung Batee pada Triwulan I Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.



Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Satuan	Target s/d Tw. I	Realisasi s/d Tw. I	Capaian Terhadap Tw. I (%)	Capaian Terhadap Tahunan (%)
1.	Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee	11	Unit	0	0		
2.	Produksi calon induk unggul ikan air payau untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee	1.379	Ekor	0	0		
3.	Produksi calon induk unggul udang untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee	22.141	Ekor	0	0		
4.	Benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee	794.150	Ekor	10.000	11.000	110,00	1,39
5.	Benih udang yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee	7.546.247	Ekor	0	0		
6.	Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee	10.991	Kg	0	0		
7.	Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBAP Ujung Batee	615	Sampel	150	352	234,67	57,24
8.	Sampel pakan dan obat ikan yang diuji Satker BPBAP Ujung Batee	8	Sampel	2	3	150,00	37,50
9.	Pengujian antimicrobial resistance Satker BPBAP Ujung Batee	14	Sampel	3	7	233,33	50,00
10.	Produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee	199	Ekor	0	0		
11.	Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee	84.586	Ekor	20.000	96.000	480,00	113,49
12.	Diseminasi teknologi pembesaran ikan Satker BPBAP Ujung Batee	300	Orang	0	0		
13.	Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee	84	Nilai	0	0		
14.	Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee	87	Indeks	0	0		
15.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Ujung Batee	100	Persen	0	0		
16.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee	85	Persen	85	92,86	109,25	109,25
17.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBAP Ujung Batee	76	Nilai	0	0		
18.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee	92	Nilai	0	0		
19.	Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee	71,5	Nilai	0	0		
20.	Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee	3	Indeks	0	0		
21.	Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee	80	Nilai	0	0		
22.	Persentase layanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee	80	Persen	80	100	125,00	125,00
23.	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee	70	Nilai	0	0		
24.	Persentase penyelesaian SOP Satker BPBAP Ujung Batee	65	Persen	0	0		



Capaian target indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 ada 7 indikator yang mencapai dan melebihi target indikator kinerja yaitu:

- 1) Benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 110 %
- 2) Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 234,67 %
- 3) Sampel pakan dan obat ikan yang diuji Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 150 %
- 4) Pengujian antimicrobial resistance Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 233,33 %
- 5) Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 480 %
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 109,25 %
- 7) Persentase layanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 125 %

Sementara itu indikator kinerja belum ada capaian karena tidak ada target di Triwulan I 2025 yaitu:

- 1) Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Unit)
- 2) Produksi calon induk unggul ikan air payau untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)
- 3) Produksi calon induk unggul udang untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)
- 4) Benih udang yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Ekor)
- 5) Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Kg)
- 6) Produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)
- 7) Diseminasi teknologi pembesaran ikan Satker BPBAP Ujung Batee (Orang)
- 8) Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)
- 9) Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee (Indeks)
- 10) Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)
- 11) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)
- 12) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)
- 13) Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)
- 14) Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee (Indeks)
- 15) Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)
- 16) Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)
- 17) Persentase penyelesaian SOP Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)

Sementara sebanyak 17 indikator kinerja tidak ada capaian karena tidak ada target di Triwulan I dan akan dihitung pada triwulan berikutnya. Secara umum indikator kinerja BPBAP Ujung Batee telah tercapai. Begitu pun pada capaian kinerja secara keseluruhan terlihat capaian target mencapai 117,38 % (dapat dilihat pada Gambar 5).

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan indikator kinerja untuk setiap Perspektif sebagai berikut:

1. SK-1: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar

IK-1: Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee

Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan kepada kelompok masyarakat berupa sarana budidaya sistem bioflok, dan mesin pakan beserta bahan baku. Capaian indikator kinerja ini dengan cara mengukur target jumlah dari realisasi unit sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan oleh BPBAP Ujung Batee. Jumlah sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria sesuai petunjuk teknis dan hasil verifikasi sesuai target jumlah unit sarana yang disalurkan.

Tabel 4. Capaian Indikator: Sarana budidaya yang disalurkan ke masyarakat

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
-	-	-	-	-	-	-	11	-

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Belum terdapat realisasi capaian sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat pada Triwulan I tahun 2024 karena belum dilakukan pengukuran mengingat tidak terdapat penetapan target pada triwulan I. Selain itu capaian indikator kinerja sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian yang sama pada Triwulan I tahun 2024. Kegiatan pada Triwulan I tahun 2025 ini masih dalam tahap identifikasi dan verifikasi kelompok calon penerima. Perbandingan capaian antar UPT Air Payau DJPB belum dapat dilakukan karena belum terdapat capaian pada setiap UPT Air Payau DJPB untuk indikator ini.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Anggaran sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp 2.230.000.000 dengan realisasi belum ada sama sekali. Anggaran tersebut sudah termasuk belanja barang non operasional, biaya identifikasi, verifikasi, monitoring calon penerima, dan pengadaan sarana budidaya itu sendiri.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Tindak lanjut telah dilakukan yaitu identifikasi kendala yang mungkin terjadi, monitoring dan evaluasi kegiatan serta akan memproses penyaluran sarana budidaya air tawar kepada kelompok penerima sesuai target yang telah ditetapkan.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Perubahan kebijakan pada awal tahun menyebabkan pelaksanaan identifikasi dan verifikasi calon penerima mengalami sedikit kendala. Perubahan kebijakan tersebut berupa ada penghematan anggaran sehingga menunggu hasil revisi pagu anggaran yang boleh digunakan untuk kegiatan penyaluran sarana budidaya ke masyarakat.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Rencana aksi ke depan akan dilakukan identifikasi secara online kepada kelompok calon penerima untuk memastikan layak menerima sarana budidaya ikan air tawar sesuai petunjuk teknis. Selanjutnya akan dilakukan pembagian wilayah binaan kepada anggota timja untuk mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan penerima bantuan dan penyuluh pendamping serta monev berkala (offline maupun online) terhadap kelompok penerima bantuan sehingga dapat mengetahui perkembangan dan progress yang berkesinambungan terhadap bantuan yang telah diberikan.

2. SK-2: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau

IK-2: Produksi calon induk unggul ikan air payau untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee

Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi calon induk unggul ikan air payau (Ikan Bandeng dan Ikan Nila) yang dihasilkan oleh BPBAP Ujung Batee. Hasil produksi calon induk ikan air payau ini dapat disalurkan kepada unit pembenihan di masyarakat maupun untuk operasional UPT. Unit pembenihan yang dapat menerima bantuan ini adalah unit pembenihan perseorangan, kelompok atau unit pembenihan ikan milik daerah yang mampu melakukan pemeliharaan induk dan pembenihan. Spesifikasi calon induk ikan secara umum harus memenuhi persyaratan sehat, mempunyai deskripsi yang jelas, yaitu jenis dan varietas induk ikan unggul, bentuk tubuh normal dan tidak cacat yang ditandai dengan anggota tubuh yang lengkap, dan ukuran calon induk ikan Bandeng telah mencapai berat 300 gram.

Tabel 5. Capaian Indikator: Produksi calon induk unggul ikan air payau

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
-	-	-	-	-	-	-	1.379	-

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Belum terdapat besaran capaian produksi calon induk unggul pada Triwulan I tahun 2025 karena pemeliharaan calon induk dilakukan sampai mencapai standar ukuran sesuai persyaratan petunjuk teknis sehingga tidak terdapat target capaian pada Triwulan I. Oleh karena itu capaian indikator kinerja calon induk unggul yang diproduksi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian yang sama pada Triwulan I tahun 2024.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Calon induk unggul ikan air payau yang diproduksi pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 124.095.000 dan belum ada realisasi anggaran sama sekali. Hal ini disebabkan seluruh anggaran tersebut masih dalam blokir yang tidak dapat dibelanjakan, dan masih menunggu kebijakan terbaru terkait efisiensi anggaran.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan produksi calon induk.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Sumber dana belum dapat digunakan sepenuhnya, menyebabkan operasional produksi calon induk kurang maksimal. Operasional produksi saat ini hanya memanfaatkan bahan dan perlengkapan dari tahun sebelumnya.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Koordinasi dan komunikasi dengan eselon I sehingga sumber dana anggaran segera dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk operasional produksi calon induk.

IK-3: Produksi calon induk unggul udang untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee

Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi calon induk unggul udang yang dihasilkan oleh BPBAP Ujung Batee. Hasil produksi calon induk udang ini dapat disalurkan kepada unit pembenihan di masyarakat maupun untuk operasional UPT. Unit pembenihan yang dapat menerima bantuan ini adalah unit pembenihan perseorangan, kelompok atau unit pembenihan ikan milik daerah yang mampu melakukan pemeliharaan induk dan pembenihan. Spesifikasi calon induk ikan secara umum harus memenuhi persyaratan sehat, mempunyai deskripsi yang jelas, yaitu jenis dan varietas induk ikan unggul, bentuk tubuh normal dan tidak cacat yang ditandai dengan anggota tubuh yang lengkap, dan ukuran calon induk udang telah mencapai berat 25 gram

Tabel 6. Capaian Indikator: Produksi calon induk unggul udang

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
-	-	-	-	-	-	-	22.141	-

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Belum terdapat besaran capaian produksi calon induk unggul pada Triwulan I tahun 2025 karena pemeliharaan calon induk dilakukan sampai mencapai standar ukuran sesuai persyaratan petunjuk teknis sehingga tidak terdapat target capaian pada Triwulan I. Oleh karena itu capaian indikator kinerja calon induk unggul udang yang diproduksi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian yang sama pada Triwulan I tahun 2024. Belum dapat dilakukan perbandingan capaian antar UPT Air Payau DJPB karena belum terdapat capaian produksi calon induk unggul udang pada Triwulan 1 tahun 2025 di semua UPT Air Payau DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Calon induk unggul ikan air payau yang diproduksi pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.016.691.000 dengan realisasi mencapai Rp 521.690.500 (51,31 %).

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan produksi calon induk.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Sumber dana anggaran yang tersedia masih diblokir sebesar Rp 129.830.000 atau 12,77 % dari anggaran kegiatan ini. Sementara sarana dan prasarana produksi calon induk membutuhkan pemeliharaan. Operasional produksi calon induk mengoptimalkan anggaran yang ada dan memanfaatkan bahan dan perlengkapan dari tahun sebelumnya.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Koordinasi dan komunikasi dengan eselon I sehingga sumber dana anggaran segera dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk operasional produksi calon induk.

IK-4: Benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee

Indikator kinerja ini mengukur jumlah ekor benih ikan air payau yang disalurkan sebagai bantuan oleh BPBAP Ujung Batee kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang dinilai berkomitmen dalam usaha pembudidayaan ikan dan mampu mengelola produksi pembesaran budi daya ikan air payau sesuai dengan kaidah-kaidah cara budi daya ikan yang baik. Kriteria benih ikan air payau yang akan disalurkan harus memenuhi persyaratan sehat, bertubuh normal atau tidak cacat, dan ukuran benih ikan Bandeng telah mencapai ukuran 1 cm, serta benih ikan Nila Salin telah mencapai ukuran 2 cm.

Tabel 7. Capaian Indikator: Benih ikan air payau yang disalurkan

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
10.000	11.000	110,00	240.000	34.000	14,17	32,35	794.150	1,39



Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Pada periode Triwulan I tahun 2025 realisasi untuk benih ikan air payau yang disalurkan telah tercapai 110 % atau sebanyak 11.000 ekor dari target 10.000 ekor. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 maka realisasi ini telah tercapai 1,39 % dari target sebanyak 794.150 ekor. Realisasi persentase benih ikan air payau yang disalurkan mengalami peningkatan di tahun 2025 dilihat dari realisasi triwulan I, di mana pada triwulan I tahun 2024 hanya tercapai 14,17 %. Jika dibandingkan dengan UPT Air Payau lingkup DJPB, persentase benih ikan payau yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Takalar mencapai 166,67 % dan BBPBAP Ujung Batee sebesar 1,39 % sedangkan BBPBAP Jepara dan BPBAP Situbondo tidak memiliki indikator kinerja bantuan benih ikan payau pada tahun 2025.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Benih ikan air payau yang disalurkan pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 194.567.000 dengan realisasi mencapai Rp 35.959.000 (18,48 %). Dari total anggaran sebesar 194.567.000 hanya sebesar 19,72 % atau Rp 38.365.000 yang dapat digunakan, sementara sisanya 80,28 % atau Rp 156.202.000 masih diblokir dan belum dapat digunakan.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Permasalahan periode sebelumnya yaitu beberapa komoditas yang belum mencapai target produksi sehingga belum dapat dilakukan pendistribusian benih di awal tahun, telah ditindaklanjuti dengan berusaha melakukan produksi lebih awal.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Kualitas dan kuantitas telur yang dihasilkan dari induk masih rendah sehingga memengaruhi hasil produksi benih ikan payau. Selain itu dengan adanya efisiensi anggaran mempengaruhi proses produksi benih ikan payau karena sarana dan prasarana produksi benih ikan air payau membutuhkan pemeliharaan. Operasional produksi benih ikan air payau untuk disalurkan ke masyarakat hanya mengoptimalkan anggaran yang ada dan memanfaatkan bahan dan perlengkapan dari tahun sebelumnya.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Pemeliharaan induk dengan memaksimalkan metoda manipulasi lingkungan, pengkayaan pakan induk untuk memperbaiki kualitas telur. Selain itu juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan eselon I sehingga sumber dana anggaran segera dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk operasional produksi benih ikan air payau untuk disalurkan ke masyarakat.

IK-5: Benih udang yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee

Benih udang adalah udang dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk larva yang akan digunakan untuk kegiatan pembudidayaan ikan. Benih yang disalurkan ke masyarakat sebagai bantuan benih ikan kepada masyarakat pembudidaya. Indikator kinerja ini mengukur jumlah ekor benih udang yang disalurkan

sebagai bantuan oleh BPBAP Ujung Batee kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang dinilai berkomitmen dalam usaha pembudidayaan ikan dan mampu mengelola produksi pembesaran budi daya ikan air payau sesuai dengan kaidah-kaidah cara budi daya ikan yang baik. Kriteria benih udang yang akan disalurkan harus memenuhi persyaratan sehat, bertubuh normal atau tidak cacat, dan ukuran untuk benih udang Windu telah mencapai ukuran PL10, serta benih udang Vaname telah mencapai ukuran PL8.

Tabel 8. Capaian Indikator: Benih udang yang disalurkan

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
-	-	-	1.500.000	4.455.960	297,06	-	7.546.247	-

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Pada periode Triwulan I tahun 2025 realisasi untuk benih udang yang disalurkan belum ada capaian sehingga belum dapat dibanding dengan target Triwulan I maupun target tahunan. Realisasi benih udang yang disalurkan pada Triwulan I 2024 mencapai 4.455.960 ekor atau 297,06 % dari target 1.500.000 ekor. Jika dibandingkan dengan UPT Air Payau lingkup DJPB, persentase benih udang yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Takalar mencapai 120 % (3.600.000 ekor) dan BBPBAP Jepara sebesar 100 % (200.000 ekor), BPBAP Situbondo dan BPBAP Ujung Batee belum memiliki capaian penyaluran benih udang pada Triwulan I tahun 2025.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Benih ikan air payau yang disalurkan pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 392.405.000 dengan realisasi mencapai Rp 85.463.000 atau 21,78 %.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Permasalahan periode sebelumnya yaitu beberapa komoditas yang belum mencapai target produksi sehingga belum dapat dilakukan pendistribusian benih di awal tahun, telah ditindaklanjuti dengan berusaha melakukan produksi lebih awal.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Sumber dana anggaran yang tersedia masih diblokir sebesar Rp 270.320.000 atau sekitar 68,89 % dari total pagu anggaran. Pada kondisi tertentu tidak bisa mendapatkan nauplius dengan kualitas yang bagus sehingga mempengaruhi proses produksi benih udang. Sementara itu kebijakan efisiensi anggaran mempengaruhi pemeliharaan sarana dan prasarana produksi benih udang untuk disalurkan. Operasional produksi benih udang saat ini hanya mengoptimalkan anggaran yang ada dan memanfaatkan bahan dan perlengkapan dari tahun sebelumnya.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Mendapatkan nauplius dari induk yang baru di ablasi untuk mendukung proses produksi benih udang. Melakukan koordinasi dan

komunikasi dengan eselon I sehingga sumber dana anggaran segera dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk operasional produksi benih udang.

IK-6: Pakan ikan air payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee

Indikator kinerja ini merupakan data dan informasi produksi pakan ikan mandiri yang dihasilkan guna menyediakan pakan yang berkualitas untuk operasional budidaya ikan yang diproduksi. Tujuannya dalam rangka mengoptimalkan unit produksi pakan ikan skala medium yang ada di UPT untuk memproduksi pakan ikan dan memaksimalkan penggunaan bahan baku yang tersedia. Volume bahan baku pakan ikan yang tersedia adalah volume pakan ikan yang akan diproduksi ditambahkan estimasi loss/penyusutan bahan baku pakan yang terjadi selama proses produksi dan penyusutan kadar air bahan baku setelah dikeringkan $\pm 20\%$.

Tabel 9. Capaian Indikator: Pakan ikan air payau yang diproduksi

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
-	-	-	-	-	-	-	10.991	-

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Belum terdapat realisasi capaian produksi pakan mandiri pada Triwulan I tahun 2025 karena tidak terdapat penetapan target pada triwulan I. Selain itu capaian indikator kinerja pakan mandiri yang diproduksi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian yang sama pada Triwulan I tahun 2024. Jika dibandingkan dengan UPT Air Payau lingkup DJPB, persentase produksi pakan mandiri BPBAP Takalar mencapai 100 % dan BBPAP Jepara sebesar 83,39 % namun BPBAP Situbondo dan BPBAP Ujung Batee belum memiliki capaian produksi pada Triwulan I tahun 2025.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Kegiatan produksi pakan mandiri pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 142.196.000 dan belum ada realisasi anggaran sama sekali. Hal ini disebabkan seluruh anggaran tersebut masih dalam status blokir yang tidak dapat dibelanjakan dan masih menunggu kebijakan terbaru terkait efisiensi anggaran.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Tidak terdapat permasalahan produksi pakan mandiri pada periode sebelumnya sehingga tidak ada tindak lanjut terhadap permasalahan sebelumnya. Selain itu status blokir anggaran produksi pakan mandiri sehingga tidak terdapat kegiatan produksi pakan mandiri.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Sumber dana anggaran yang tersedia untuk kegiatan produksi pakan mandiri masih status blokir. Sementara sarana dan prasarana produksi pakan mandiri membutuhkan anggaran untuk pemeliharaan.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Koordinasi dan komunikasi dengan eselon I sehingga sumber dana anggaran segera dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk operasional produksi pakan mandiri.

IK-7: Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBAP Ujung Batee

Layanan pengujian sampel yang dilakukan oleh laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan BPBAP Ujung Batee berdasarkan tujuan pemeriksaan terdiri dari pengujian Kualitas Air, Mikrobiologi, dan Biologi Molekuler. Jumlah yang dihitung sebagai capaian adalah banyak sampel pengujian yang masuk baik secara internal maupun eksternal, bukan berdasarkan banyaknya kegiatan pengujian di setiap parameter yang mampu diselesaikan oleh laboratorium uji. Jumlah capaian dihitung dari jumlah sampel kualitas air + jumlah sampel mikrobiologi + jumlah sampel biologi molekuler (yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium).

Tabel 10. Capaian Indikator: Sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
150	352	234,67	329	463	140,73	76,03	615	57,24

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Realisasi persentase kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji berhasil mencapai target Triwulan I yaitu sebesar 234,67 % dan mencapai sebesar 57,24 % dari target tahunan. Realisasi persentase kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji mengalami peningkatan pengujian sebesar 76,03 % apabila dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun 2024. Capaian terhadap target tahunan BPBAP Ujung Batee (57,24 %) adalah yang terendah jika dibandingkan dengan UPT air payau DJPB lainnya yaitu BPBAP Takalar (136,19 %), BPBAP Situbondo (125,48 %) dan BBPBAP Jepara (77,36 %). Adapun capaian sampel uji di laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBAP Ujung Batee sampai dengan Triwulan I tahun 2025 ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Jumlah sampel pengujian berdasarkan ruang lingkup uji

Ruang Lingkup Uji	Jumlah Sampel
Kualitas air (kimia)	226
Mikrobiologi	77
Biologi molekuler	49
Jumlah	352

Pencapaian realisasi target pada Triwulan I tahun 2025 didominasi oleh pelayanan pengujian sampel kualitas air, sampel yang dihitung hanya pengujian secara kimiawi tidak termasuk pengujian fisika.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 209.857.000, dengan realisasi mencapai Rp 576.000 atau 0,27 %. Angka realisasi masih tergolong sangat kecil tersebut disebabkan oleh sebagian besar anggaran yaitu 53,29 % atau Rp 111.836.000 masuk ke dalam kebijakan efisiensi anggaran.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Hasil rekomendasi tindak lanjut telah dilakukan perbaikan pada beberapa alat sehingga proses pengujian sampel dapat berlangsung dengan baik.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sehingga berdampak pada belanja operasional bahan pengujian laboratorium namun hal ini tidak menjadi kendala karena proses pengujian masih dapat berlangsung dengan menggunakan bahan uji sisa anggaran tahun sebelumnya.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Melanjutkan proses pengujian sampel berdasarkan ruang lingkup uji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBAP Ujung Batee. Koordinasi dan komunikasi dengan eselon I sehingga sumber dana anggaran segera dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk kegiatan pelayanan laboratorium.

IK-8: Sampel pakan dan obat ikan yang diuji Satker BPBAP Ujung Batee

Indikator kinerja ini merupakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pengujian laboratorium nutrisi dan mutu pakan. Pengujian nutrisi pada sampel pakan ikan meliputi parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. Pengujian mutu pakan pada sampel pakan ikan yaitu pengujian kontaminan pakan yang terdiri atas kontaminan logam berat (Pb, Cd dan Hg), antibiotik (nitrofurans, kloramfenikol, oksitetrasiklin), mikotoksin (aflatoksin) dan melamin.

Tabel 12. Capaian Indikator: Sampel pakan dan obat ikan yang diuji

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
2	3	150,00	3	14	466,67	21,43	8	37,50

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Realisasi persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan berhasil mencapai target Triwulan I yaitu sebesar 150 % dan jika dibandingkan dengan target tahunan mencapai sebesar 37,50 % dari target tahunan. Realisasi persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan Triwulan I tahun 2025 mengalami pertumbuhan 21,43 % dibanding periode yang sama pada Triwulan I tahun 2024. Jika dibandingkan dengan UPT Air Payau DJPB

lainnya, capaian persentase pengujian sampel nutrisi dan mutu pakan Triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan BPBAP Ujung Batee (37,50 %) lebih tinggi dibandingkan BBPBAP Jepara (32,35 %) namun lebih rendah jika dibandingkan dengan BPBAP Takalar (100 %).

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja pengujian pakan dan obat ikan sebesar Rp 4.175.000, namun karena kebijakan efisiensi anggaran sehingga belum ada realisasi anggaran untuk pelayanan kegiatan pengujian pakan dan obat ikan pada Triwulan I tahun 2025.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Melakukan pengujian sampel pakan dan obat ikan berdasarkan sampel yang diperoleh atau ditargetkan.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Belum ada perbaikan terhadap kerusakan alat uji nutrisi dan mutu pakan sehingga tidak semua parameter uji dapat dilakukan. Selain itu juga tidak tersedia anggaran khusus perjalanan pengambilan sampel untuk pengujian nutrisi dan mutu pakan sehingga pencapaian indikator hanya sampling pasif yaitu menerima sampel yang masuk ke laboratorium untuk pemeriksaan uji nutrisi dan mutu pakan.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Melanjutkan pelayanan pengujian sampel pakan dan obat ikan dengan tetap mempertahankan kinerja laboratorium sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna jasa internal dan eksternal.

IK-9: Pengujian antimicrobial resistance Satker BPBAP Ujung Batee

Resistensi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Pengendalian Resistansi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resisten. Semakin kecil tingkat resistansi mikroba, semakin bagus pengendalian resistansi antimikrobanya.

Tabel 13. Capaian Indikator: Pengujian antimikrobal resisten

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
3	7	233,33	8	8	100,00	87,50	14	50,00

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Realisasi persentase pengujian sampel antimikrobal berhasil mencapai target Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 233,33 % dan jika dibandingkan dengan target tahunan mencapai sebesar 50 % dari target tahunan. Realisasi persentase pengujian sampel antimikrobal Triwulan I tahun 2025

mengalami pertumbuhan 87,50 % dibanding periode yang sama pada Triwulan I tahun 2024. Berdasarkan perbandingan capaian target tahunan pengujian sampel antimikrobal resisten antar UPT Air Payau DJPB, BPBAP Ujung Batee (50 %) memiliki capaian lebih rendah dibandingkan BPBAP Takalar (150 %) sedangkan BPBAP Situbondo dan BBPBAP Jepara belum melakukan pengujian antimikrobal resisten pada Triwulan I tahun 2025.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja pengujian sampel antimikrobal resisten adalah Rp 12.796.000 untuk biaya perjalanan pengambilan sampel ke beberapa lokasi target sampling. Belum ada realisasi anggaran untuk kegiatan ini pada Triwulan I tahun 2025. Bahan uji yang digunakan pada kegiatan ini merupakan sisa bahan dari anggaran tahun sebelumnya.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait perihal lokasi yang dapat dikunjungi untuk pengambilan sampel pengujian antimikrobal resisten.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian target realisasi pada Triwulan I tahun 2025. Pengujian antimikrobal resisten menggunakan bahan uji dari tahun anggaran sebelumnya.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Koordinasi dan komunikasi dengan eselon I sehingga sumber dana anggaran segera dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk pencapaian target indikator kinerja pengujian antimikrobal resisten.

3. SK-3: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut

IK-10: Produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee

Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi calon induk unggul ikan air laut yang dihasilkan oleh BPBAP Ujung Batee. Hasil produksi calon induk ini akan dimanfaatkan untuk operasional UPT. Spesifikasi calon induk ikan secara umum harus memenuhi persyaratan sehat, mempunyai deskripsi yang jelas, yaitu jenis dan varietas induk ikan unggul, bentuk tubuh normal dan tidak cacat yang ditandai dengan anggota tubuh yang lengkap, dan ukuran calon induk ikan Kakap Putih telah mencapai berat 300 gram.

Tabel 14. Capaian Indikator: Produksi calon induk unggul ikan air payau

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
-	-	-	-	-	-	-	199	-

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Belum terdapat besaran capaian produksi calon induk unggul pada Triwulan I tahun 2025 karena pemeliharaan calon

induk dilakukan sampai mencapai standar ukuran sesuai persyaratan petunjuk teknis sehingga tidak terdapat target capaian pada Triwulan I tahun 2025. Oleh karena itu capaian indikator kinerja calon induk unggul yang diproduksi Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian yang sama pada Triwulan I tahun 2024.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Calon induk unggul ikan air payau yang diproduksi pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 53.730.000, namun karena kebijakan efisiensi anggaran sehingga belum ada realisasi anggaran untuk pelayanan kegiatan pengujian pakan dan obat ikan pada Triwulan I tahun 2025.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan produksi calon induk.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator.

Sumber dana anggaran yang tersedia seluruhnya masih diblokir, sementara sarana dan prasarana produksi calon induk membutuhkan pemeliharaan. Operasional produksi calon induk mengoptimalkan dan memanfaatkan bahan dan perlengkapan dari tahun sebelumnya.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Koordinasi dan komunikasi dengan eselon I sehingga sumber dana anggaran segera dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk operasional produksi calon induk.

IK-11: Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee

Benih ikan air laut adalah ikan yang hidup diperairan laut dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk larva yang akan digunakan untuk kegiatan pembudidayaan ikan. Benih yang disalurkan ke masyarakat sebagai bantuan benih ikan kepada masyarakat pembudidaya. Indikator kinerja ini mengukur jumlah ekor benih ikan air payau yang disalurkan sebagai bantuan oleh BPBAP Ujung Batee kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang dinilai berkomitmen dalam usaha pembudidayaan ikan dan mampu mengelola produksi pembesaran budi daya ikan air payau sesuai dengan kaidah-kaidah cara budi daya ikan yang baik. Kriteria benih ikan air payau yang akan disalurkan harus memenuhi persyaratan sehat, bertubuh normal atau tidak cacat, dan ukuran benih ikan Kakap Putih telah mencapai ukuran 2,5 cm.

Tabel 15. Capaian Indikator: Benih ikan air laut yang disalurkan

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
20.000	96.000	480,00	50.000	55.000	110,00	174,55	84.586	113,49

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Pada periode Triwulan I tahun 2025 realisasi untuk benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat telah tercapai 480 % atau sebanyak 96.000 ekor dari target 20.000 ekor. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 maka realisasi ini telah tercapai 113,49 % dari target sebanyak 84.586 ekor. Realisasi persentase benih ikan air laut yang disalurkan mengalami peningkatan di tahun 2025 dilihat dari realisasi triwulan I, di mana pada triwulan I tahun 2024 hanya tercapai 110 %. Perbandingan capaian antar UPT Air payau lingkup DJPB, persentase capaian tertinggi oleh BPBAP Situbondo sebesar 117,42 % kemudian BPBAP Ujung Batee sebesar 113,49 %. BPBAP Takalar tidak memiliki target capaian penyaluran benih ikan laut pada Triwulan 1 tahun 2025 sedangkan BBPBAP Jepara tidak memiliki indikator kinerja ini pada tahun 2025.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Benih ikan air laut yang disalurkan pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 507.516.000 dengan realisasi mencapai Rp 169.485.300 (33,40 %).

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Permasalahan periode sebelumnya yaitu beberapa komoditas yang belum mencapai target produksi sehingga belum dapat dilakukan pendistribusian benih di awal tahun, telah ditindaklanjuti dengan berusaha melakukan produksi lebih awal.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Pada kondisi tertentu seperti musim hujan menyebabkan produksi fitoplankton menurun sehingga mempengaruhi tingkat keberlangsungan hidup rotifer dan pemeliharaan benih ikan air laut. Sarana dan prasarana produksi benih ikan air laut membutuhkan pemeliharaan namun anggaran Sebagian masih terblokir. Operasional produksi benih ikan air laut untuk disalurkan ke masyarakat hanya mengoptimalkan anggaran yang ada dan memanfaatkan bahan dan perlengkapan dari tahun sebelumnya.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Melakukan kontrol oleh laboratorium pakan alami untuk pengecekan kondisi fitoplankton dengan melakukan inokulasi baru jika terdapat kontaminasi pada kultur skala massal. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan eselon I sehingga sumber dana anggaran segera dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk operasional produksi benih ikan air laut untuk disalurkan ke masyarakat.

IK-12: Diseminasi teknologi pembesaran ikan Satker BPBAP Ujung Batee

Pengembangan teknologi perikanan budidaya salah satunya dengan melakukan diseminasi. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang interaktif dalam menyampaikan informasi yang mana ditujukan kepada kelompok masyarakat ataupun individu. Diseminasi teknologi pembesaran ikan merupakan suatu kegiatan interaktif dalam menyampaikan informasi teknologi budidaya perikanan pada lokasi yang telah

ditentukan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku pembudidaya perikanan untuk dapat meningkatkan produksi.

Tabel 16. Capaian Indikator: Diseminasi teknologi pembesaran ikan

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
-	-	-	-	-	-	-	300	-

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Belum terdapat persentase besaran capaian diseminasi teknologi pembesaran ikan pada Triwulan I tahun 2025 karena tidak terdapat target pada triwulan ini. Oleh karena itu capaian indikator kinerja diseminasi teknologi pembesaran ikan Triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian yang sama pada Triwulan I tahun 2024. Indikator kinerja ini juga belum dapat dibandingkan antar UPT Air Payau lingkup DJPB karena semua satker belum memiliki capaian pada triwulan I tahun 2025.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Kegiatan diseminasi teknologi pembesaran ikan pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 300.000.000 namun karena kebijakan efisiensi anggaran sehingga belum ada realisasi anggaran untuk kegiatan diseminasi teknologi pembesaran ikan pada Triwulan I tahun 2025.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Tindak lanjut telah dilakukan yaitu identifikasi kendala yang mungkin terjadi, monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga diseminasi teknologi pembesaran ikan dapat dilaksanakan dan informasi tersampaikan kepada kelompok penerima.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Tidak terdapat target capaian kegiatan diseminasi teknologi pembesaran ikan pada Triwulan I tahun 2025 sehingga belum ditemukan permasalahan.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Koordinasi dan komunikasi dengan eselon I sehingga sumber dana anggaran segera dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk kegiatan diseminasi teknologi pembesaran ikan.

4. SK-4: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPBAP Ujung Batee

IK-13: Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPBAP Ujung Batee. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian

rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Tabel 17. Capaian Indikator: Nilai penilaian mandiri SAKIP

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
-	-	-	-	-	-	-	84	-

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I 2025 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2024 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB belum dapat dilakukan karena belum terdapat persentase capaian indikator kinerja ini pada semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Kendala yang dialami periode sebelumnya yaitu kurangnya personil kerja yang aktif mengerjakan pemenuhan dokumen-dokumen kinerja, sehingga menyebabkan penyelesaian dokumen kinerja membutuhkan waktu yang lama. Kendala tersebut ditindaklanjuti dengan meningkatkan 1) koordinasi antar Kelompok Kerja dalam pemenuhan dokumen kinerja; 2) pimpinan secara berkala meningkatkan perhatiannya terhadap pelaksanaan SAKIP; dan 3) personal tim kinerja mencoba mengikuti webinar yang tersedia secara mandiri, dan pimpinan mendorong personil untuk meningkatkan pemahamannya terkait SAKIP.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Kendala yang dialami masih sama dengan periode sebelumnya adalah kurangnya personil kerja yang aktif mengerjakan pemenuhan dokumen-dokumen kinerja, sehingga menyebabkan penyelesaian dokumen kinerja membutuhkan waktu yang lama. Serta kurangnya pemahaman terhadap SAKIP.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode yang akan datang adalah tetap melakukan pengelolaan kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan adalah perlunya

penambahan personil kerja yang menangani pengelolaan kinerja dan meningkatkan koordinasi antar Kelompok Kerja dalam pemenuhan dokumen kinerja.

IK-14: Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 dimensi, meliputi:

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai. Dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan.
2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara. Dimensi kompetensi yang digunakan terdiri atas bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal and nonklasikal.
3. Kinerja diukur dari indikator penilaian kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Prilaku kerja.
4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Tabel 18. Capaian Indikator: Indeks profesionalitas ASN

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
-	-	-	-	-	-	-	81	-

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I Tahun 2025 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2024 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB belum dapat dilakukan karena belum terdapat persentase capaian indikator kinerja ini pada semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Kendala yang dialami periode sebelumnya yaitu diklat kepemimpinan dan fungsional tertentu tidak sepanjang waktu tersedia selain itu ketersediaan anggaran untuk mengikuti diklat. Saat ini pimpinan sedang melaksanakan diklat kepemimpinan, sedangkan fungsional tertentu saat ini belum ada perkembangan terkait diklat fungsionalnya.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Kendala yang dialami masih sama dengan periode sebelumnya antara lain diklat fungsional terbatas, diklat 20 JP belum beragam dan anggaran belum maksimal sehingga indeks profesionalitas ASN tepatnya komponen kompetensi berpotensi rendah.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Melakukan sosialisasi kepada pegawai tentang pentingnya pengembangan kompetensi serta sosialisasi terkait bimtek/pelatihan yang mampu menaikkan nilai IP ASN pegawai BPBAP Ujung Batee. Memonitoring pelaksanaan pemenuhan IP ASN pegawai BPBAP Ujung Batee serta mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai target.

IK-15: Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Ujung Batee

Persentase penyelesaian LHP BPK atas BPBAP Ujung Batee merupakan persentase penyelesaian tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas BPBAP Ujung Batee sebagai pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah ditindaklanjuti/diselesaikan oleh BPBAP Ujung Batee. Kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian indikator dihitung berdasarkan jumlah temuan pada LHP yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah temuan pada LHP.

Tabel 19. Capaian Indikator: Persentase penyelesaian temuan BPK

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
-	-	-	-	-	-	-	100	-

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I Tahun 2025 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun

anggaran 2024 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB belum dapat dilakukan karena belum terdapat persentase capaian indikator kinerja ini pada semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Mempertahan komitmen dibuktikan dengan sesegera mungkin memenuhi permintaan dokumen dalam pengawasan atau pemeriksaan, dan jika ada temuan sesegera mungkin diselesaikan tindak lanjutnya.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan pertama 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

IK-16: Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan merupakan pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BPBAP Ujung Batee berdasarkan pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab, yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPBAP Ujung Batee yang menjadi objek pengawasan inspektorat jenderal. Capaian indikator dihitung berdasarkan hasil dokumen tindak lanjut yang telah tuntas diselesaikan dan telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan yang dilakukan dalam satuan persen. Jika tidak ada rekomendasi maka capaian atas indikator kinerja ini adalah sama dengan target sehingga persentase capaian atas target sebesar seratus persen.

Tabel 20. Capaian Indikator: Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
85	92,86	109,25	80	94,44	118,05	98,33	85	109,25

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Realisasi sudah melampaui target Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 109,25 %. Berbeda dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya realisasi rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja tercapai 118,05 %.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Mempertahankan komitmen dibuktikan dengan sesegera mungkin memenuhi permintaan dokumen dalam pengawasan, dan jika ada rekomendasi sesegera mungkin dtindaklanjutnya, serta komunikasi dan koordinasi dengan Itjen.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan pertama 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Mempertahankan komitmen untuk segera melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dan meningkatkan komunikasi dengan Itjen dengan harapan memiliki persepsi yang sama atas rekomendasi.

IK-17: Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBAP Ujung Batee

Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK adalah suatu predikat yang diperoleh satker yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Penguatan Pengawasan;
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penilaian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;

3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen "kinerja lebih baik" minimal 2,50;
4. Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14,00 (survei 3,20).

Nilai minimal yang diperoleh merupakan hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP.

Tabel 21. Capaian Indikator: Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk menuju WBK

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
-	-	-	-	-	-	-	76	-

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I Tahun 2025 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2024 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB belum dapat dilakukan karena belum terdapat persentase capaian indikator kinerja ini pada semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. a) Telah dilakukan peran serta seluruh pegawai dan tergambar dalam matrik peran hasil; b) Sarana prasana layanan publik ditingkatkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada; c) Pimpinan secara berkala memonitoring dan mengevaluasi pemenuhan dokumen WBK.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan pertama 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pembangunan zona integritas di BPBAP Ujung Batee sesuai ekspektasi.

IK-18: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang

selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui: (1) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (2) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D); dan (3) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP), penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja.

Tabel 22. Capaian Indikator: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
-	-	-	-	-	-	-	92	-

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I Tahun 2025 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2024 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB belum dapat dilakukan karena belum terdapat persentase capaian indikator kinerja ini pada semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. RPD telah memperhatikan kemampuan penggunaan dana dengan tetap memperhatikan ketentuan. Dalam setiap rapat monitoring/evaluasi kegiatan secara periodik selalu dijelaskan ketentuan penggunaan penggunaan dana. Juga dalam setiap rapat monitoring/evaluasi menyinggung dan memperhatikan capaian komponen IKPA.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Adanya pemblokiran anggaran mengakibatkan beberapa komponen IKPA akan tidak maksimal, seperti deviasi maupun serapan anggaran.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar nilai IKPA serta koordinasi/komunikasi dengan KPPN dan Kanwil DJPb agar semua kendala pelaksanaan anggaran dapat segera ditindaklanjuti.

IK-19: Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu, yang berpedoman pada KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:

1. Variabel Efektivitas. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Variabel Efisiensi. Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi: a) Penggunaan SBK; dan/atau b) Efisiensi SBK

Nilai kinerja perencanaan anggaran satker BPBAP Ujung Batee diperoleh dari aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) e-monev anggaran Kementerian Keuangan.

Tabel 23. Capaian Indikator: Nilai kinerja perencanaan anggaran

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
-	-	-	-	-	-	-	71,50	-

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I Tahun 2025 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2024 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB belum dapat dilakukan karena belum terdapat persentase capaian indikator kinerja ini pada semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Target volume RO telah memperhatikan estimasi capaian dan tidak dibagi rata-rata.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Capaian output (RO) bisa saja jauh setelah pencairan penggunaan anggaran, sehingga terjadi realisasi anggaran sudah maksimal tetapi realisasi RO masih rendah.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar NKPA tercapai optimal.

IK-20: Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee

Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari perencanaan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur. Proses tersebut dibagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu (1) dokumen kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN); (2) dokumen pengembangan kompetensi ASN, yang terdiri dari layanan tugas belajar, izin belajar, ujian dinas; (3) dokumen layanan mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, kenaikan pangkat, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (4) dokumen layanan ketatausahaan ASN, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan, dan (5) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN.

Indeks pengelolaan SDM Aparatur merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengukuran merupakan rata-rata hasil capaian komponen penyusun indeks yang telah ditetapkan (rata-rata tersebut ditetapkan dengan mengkonversikan persentase rata-rata dengan nilai six sigma).

Tabel 24. Capaian Indikator: Indeks pengelolaan SDM

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
-	-	-	-	-	-	-	3	-

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I Tahun 2025 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2024 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB belum dapat dilakukan karena belum terdapat persentase capaian indikator kinerja ini pada semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah diusulkan dan diarahkan untuk ikut serta pegawai dalam diklat yang tersedia.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Pegawai yang diusulkan untuk pencantuman gelar akademik belum disetujui.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Mengusulkan kembali pencantuman gelar akademik pegawai yang bersangkutan. Selain itu koordinasi dan komunikasi dengan Tim Kerja Kepegawaian Ditjen Perikanan Budi Daya.

IK-21: Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan *good governance*. Memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Perhitungan nilai keterbukaan informasi publik dilakukan dengan memperhatikan indikator penilaian yaitu mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana prasarana, kelembagaan dan digitalisasi. Selain presentasi uji publik, persentase penilaian terbesar dari instrument penilaian mandiri yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian dalam hal ini Biro Humas – Sekretariat Jenderal KKP atau *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ).

Tabel 25. Capaian Indikator: Pelayanan keterbukaan informasi publik

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
-	-	-	-	-	-	-	80	-

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I Tahun 2025 dan baru dimasukkan pada tahun 2025 sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB belum dapat dilakukan karena belum terdapat pengukuran/penilaian persentase capaian indikator kinerja ini pada semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Indikator kinerja belum ada di periode sebelumnya, mulai diadopsi tahun 2025.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan pertama 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelayanan keterbukaan informasi publik sesuai ekspektasi.

IK-22: Persentase layanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee

Layanan perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya. Selain pelayanan internal dalam kegiatan layanan perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja.

Tabel 26. Capaian Indikator: Persentase layanan perkantoran

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
80	100,00	125,00	75	100,00	133,33	100,00	80	125,00

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Realisasi sudah melampaui target Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 125 %. Berbeda dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya realisasi persentase layanan perkantoran tercapai 133,33 %. Perbandingan realisasi persentase layanan perkantoran antar UPT Air Payau Lingkup DJPB menunjukkan persentase yang sama yaitu tercapai 100 % untuk semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Layanan perkantoran BPBAP Ujung Batee pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 10.391.310.000 realisasi mencapai Rp 2.787.769.550 (26,83 %).

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan optimalisasi sumber daya manusia, sarana prasarana seperti meninjau ulang job description SDM dan melakukan pemeliharaan beberapa sarana prasarana.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan pertama 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelayanan perkantoran sesuai ekspektasi.

IK-23: Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan arsip dinamis: penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip.
2. Sumber daya kearsipan: sumber daya manusia kearsipan, prasarana dan sarana.

Tabel 27. Capaian Indikator: Nilai pengawasan kearsipan internal

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
-	-	-	-	-	-	-	70	-

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I Tahun 2025 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2024 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB belum dapat dilakukan karena belum terdapat pengukuran/penilaian persentase capaian indikator kinerja ini pada semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah ditunjuk personil kerja tambahan untuk membantu menangani kearsipan.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Belum adanya pejabat fungsional arsiparis.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelayanan perkantoran sesuai ekspektasi.

IK-24: Persentase penyelesaian SOP Satker BPBAP Ujung Batee

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut:

1. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 50 persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi berdasarkan matriks Identifikasi SOP. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja.
2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 50 persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

Tabel 28. Capaian Indikator: Persentase penyelesaian SOP

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)	Target 2025	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
-	-	-	-	-	-	-	65	-

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I Tahun 2025 dan baru dimasukkan pada tahun 2025 sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perbandingan capaian antar UPT Air Payau lingkup DJPB belum dapat dilakukan karena belum terdapat pengukuran/penilaian persentase capaian indikator kinerja ini pada semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Indikator kinerja belum ada di periode sebelumnya, mulai diadopsi tahun 2025.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan pertama 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar penyelesaian SOP sesuai ekspektasi.

3.3. Kinerja Anggaran

Pada tahun 2024 terjadi perubahan nomenklatur Ditjen Perikanan Budidaya sehingga berpengaruh terhadap struktur aktivitas/kegiatan pada sistem penganggaran. Sehingga pada tahun 2025 tidak ada lagi kegiatan pengelolaan perbenihan, kawasan dan kesehatan ikan, produksi dan usaha, serta pakan dan obat ikan, digantikan dengan pengelolaan budi daya ikan air payau, ikan air laut, dan ikan air tawar.

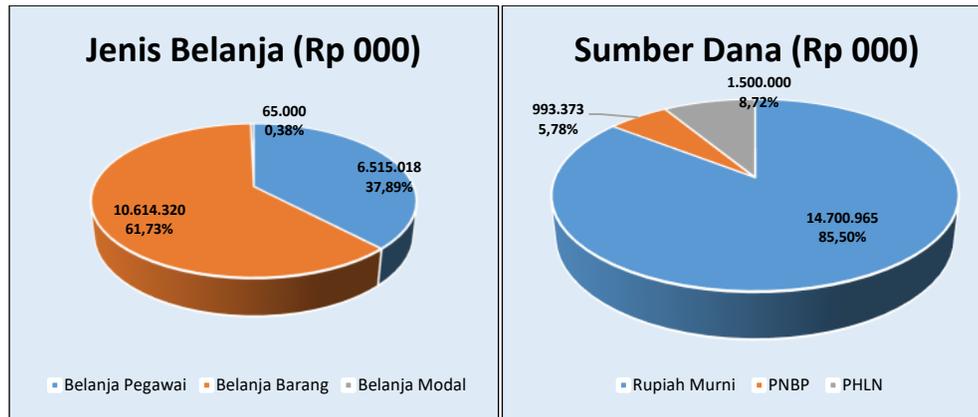
Alokasi APBN tahun 2025 pada BPBAP Ujung Batee sebesar Rp 17.194.338.000, yang terbagi ke dalam beberapa aktivitas/kegiatan. Sedangkan pada tahun 2024 mengelola anggaran mencapai sebesar Rp 24.754.464.000. Jika dibandingkan, alokasi anggaran tahun 2021-2021 mengalami penurunan. Tahun 2025 menjadi pagu anggaran terendah dalam rentang tahun anggaran 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 29. Pagu anggaran tahun 2021-2025

Aktivitas/Kegiatan	Anggaran 2025 (Rp 000)	Anggaran 2024 (Rp 000)	Anggaran 2023 (Rp 000)	Anggaran 2022 (Rp 000)	Anggaran 2021 (Rp 000)
Pengelolaan Perbenihan Ikan (2344)		3.859.888	4.506.581	2.712.761	4.744.920
Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan (2345)		1.234.433	11.472.463	2.093.262	14.796.227
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan (2346)		7.080.000	7.429.000	3.500.000	2.698.400
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PB (2348)	10.506.310	11.835.773	11.244.282	10.675.751	9.767.689
Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan (5747)		744.370	659.576	592.324	1.831.587
Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau (7022)	3.596.782				
Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut (7023)	861.246				
Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar (7024)	2.230.000				
Total Anggaran	17.194.338	24.754.464	35.311.902	19.574.098	33.838.823

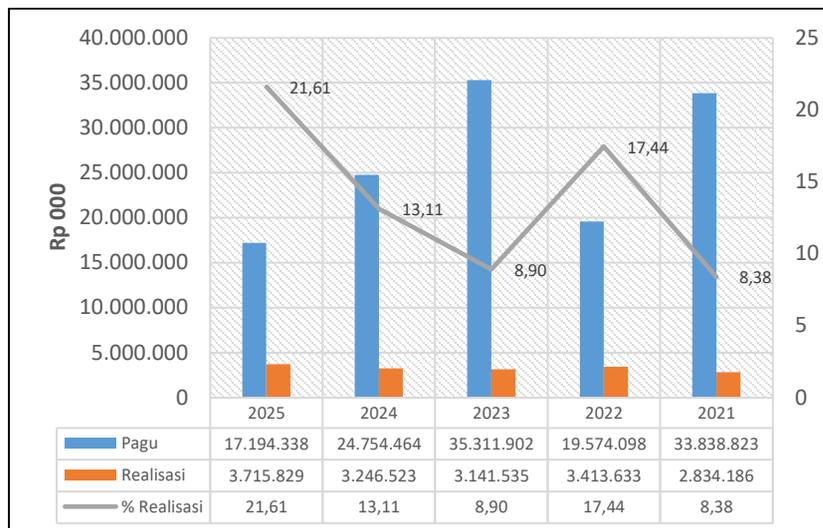
Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PB (2348) menjadi yang tertinggi alokasi anggarannya selama periode 2021-2025. Sedangkan kegiatan Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan (5747) sebagai terendah sepanjang tahun 2021-2024, dan Pengelolaan Budi Daya Air Laut pada tahun 2025.

Tahun 2025 belanja barang mendapatkan alokasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja modal, yaitu 61,73 % dari total anggaran. Selain itu sumber dana belanja terdiri dari Rupiah Murni sebesar 85,5 %, PNBPN sebesar 5,78 %, dan ada sumber dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) mencapai 8,72 %.



Gambar 6. Alokasi jenis belanja dan sumber dana belanja tahun 2025

Data *time series* 2021-2025 menunjukkan pagu anggaran setiap tahunnya mengalami naik turun, seperti ditampilkan pada gambar berikut.



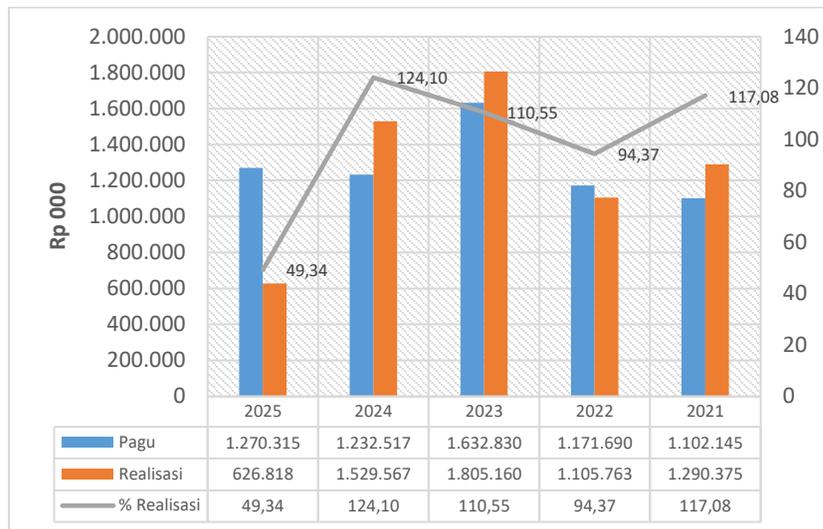
Gambar 7. Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2021-2025

Peningkatan terbesar terjadi tahun 2023 mencapai sebesar 35 milyar dan terendah pada 2025 hanya sebesar 17 milyar. Berbeda dengan realiasi anggaran pada triwulan 1 dimana realisasi tertinggi justru terjadi pada tahun 2025 mencapai 21,61 % dari total pagu anggaran 17 milyar rupiah, sementara terendah pada tahun 2023 hanya sebesar 8,9 % dari total pagu anggaran 35 milyar rupiah.

Selanjutnya dari sisi penerimaan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dasar hukum pemungutan PNBP pada BPBAP Ujung Batee yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang pedoman umum PNBP dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sumber PNBP BPBAP Ujung Batee berasal dari:

- 1) Pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yaitu PNBP yang berasal dari pungutan perikanan. Pungutan perikanan adalah pungutan negara atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha budidaya Perikanan.
- 2) PNBP Non SDA yaitu PNBP yang berasal dari penjualan hasil usaha budidaya dan imbalan jasa UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. PNBP ini terdiri dari: (i) Penjualan hasil Perikanan Budidaya; (ii) Imbal Jasa Teknologi; (iii) Jasa Desiminasi; (iv) Jasa Penggunaan Laboratorium; (v) Jasa Penggunaan fasilitas; (vi) Jasa Fasilitas Lainnya; dan (vii) Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Data *time series* 2021-2025 menunjukkan target PNBP mengalami naik turun, seperti ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 8. Target dan Realisasi PNBP Tahun 2021-2025

Tahun 2025 BPBAP Ujung Batee ditargetkan PNBP sebesar Rp 1.270.315.000, dengan realisasi sampai dengan 31 Maret 2025 mencapai 51,77 % atau Rp 626.817.581. Capaian ini tergolong tinggi mengingat triwulan I atau $\frac{1}{4}$ tahun sudah mencapai realisasi hampir $\frac{1}{2}$ target. Jika dibandingkan target PNBP selama tahun 2021-2025 cenderung mengalami penurunan, peningkatan target hanya terjadi pada tahun 2023. Target PNBP tertinggi pada tahun 2023 mencapai sebesar 1,6 milyar rupiah sedangkan terendah tahun 2021 hanya sebesar 1,1 milyar. Realisasi tertinggi pada tahun 2024 mencapai 124,10 % dari target dan realisasi terendah tahun 2022 hanya sebesar 94,37 %, artinya sepanjang tahun 2021 s/d 2024 hanya pada tahun 2022 realisasi PNBP tidak mencapai target.



BAB 4. PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) BPBAP Ujung Batee Triwulan I Tahun 2025 menyajikan capaian indikator kinerja selama Januari s.d Maret 2025. Terhadap capaian tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian indikator kinerja tahun sebelumnya pada Triwulan I sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Berdasarkan target triwulanan pada rencana aksi BPBAP Ujung Batee Tahun 2025, dari total 24 indikator kinerja pendukung sasaran strategis, sebanyak 7 indikator kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Triwulan I, dan indikator kinerja yang tidak ada data capaiannya sebanyak 17 indikator karena tidak ditarget pada Triwulan I tahun 2025.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPBAP Ujung Batee Tahun 2025 ini antara lain adanya kebijakan efisiensi anggaran dimana sebagian anggaran kegiatan diblokir tidak dapat dicairkan sehingga sedikit banyak berpengaruh kegiatan satuan kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 30. Kendala dan rencana aksi triwulan I 2025

Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Permasalahan dalam Pencapaian Target	Rencana Aksi
1 Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee	11	Unit	-	-	Perubahan kebijakan pada awal tahun menyebabkan pelaksanaan identifikasi dan verifikasi calon penerima mengalami sedikit kendala.	Identifikasi secara online kepada kelompok calon penerima.
2 Produksi calon induk unggul ikan air payau untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee	1.379	Ekor	-	-	Sumber dana belum dapat digunakan sepenuhnya, menyebabkan operasional produksi calon induk kurang maksimal.	Koordinasi dan komunikasi dengan eselon I dan mengoptimalkan sumber dana yang ada.
3 Produksi calon induk unggul udang untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee	22.141	Ekor	-	-	Sumber dana anggaran yang tersedia sebagian masih diblokir. Sementara sarana dan prasarana produksi calon induk membutuhkan pemeliharaan.	Koordinasi dan komunikasi dengan eselon I dan mengoptimalkan sumber dana yang ada.
4 Benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee	794.150	Ekor	10.000	11.000	Telur yang dihasilkan dari induk masih belum bagus kualitasnya dan secara kuantitas masih sedikit jumlahnya (secara kualitas dan kuantitas belum normal).	Pemeliharaan induk dengan memaksimalkan metode manipulasi lingkungan, pengkayaan pakan untuk memperbaiki kualitas telur.
5 Benih udang yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee	7.546.247	Ekor	-	-	Pada kondisi tertentu tidak bisa mendapatkan kualitas nauplius yang tidak bagus.	Harus bisa mendapatkan nauplius yang dihasilkan dari induk yang baru di ablasi dan kualitas F1.
6 Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee	10.991	Kg	-	-	Sumber dana anggaran yang tersedia status blokir. Sementara sarana dan prasarana produksi membutuhkan anggaran untuk pemeliharaan	Koordinasi dan komunikasi dengan eselon I dan mengoptimalkan sumber dana yang ada.
7 Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBAP Ujung Batee	615	Sampel	150	352	Kebijakan efisiensi anggaran, sehingga berdampak pada belanja operasional bahan pengujian laboratorium.	Koordinasi dan komunikasi dengan eselon I dan mengoptimalkan sumber dana yang ada.
8 Sampel pakan dan obat ikan yang diuji Satker BPBAP Ujung Batee	8	Sampel	2	3	Belum ada perbaikan terhadap kerusakan alat uji nutrisi dan mutu pakan sehingga tidak semua parameter uji dapat dilakukan.	Mempertahankan kinerja laboratorium sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna jasa internal dan eksternal.
9 Pengujian antimicrobial	14	Sampel	3	7	Pengujian antimikrobal resisten	Anggaran segera dapat



Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Permasalahan dalam Pencapaian Target	Rencana Aksi
resistance Satker BPBAP Ujung Batee					menggunakan bahan uji dari tahun anggaran sebelumnya.	dimanfaatkan dengan optimal.
10 Produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee	199	Ekor	-	-	Sumber dana anggaran sebagian masih diblokir. Sementara sarana dan prasarana produksi membutuhkan pemeliharaan.	Koordinasi dan komunikasi dengan eselon I dan mengoptimalkan sumber dana yang ada
11 Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee	84.586	Ekor	20.000	96.000	Pada kondisi tertentu seperti musim hujan produksi fitoplankton menurun yang berpengaruh pada tingkat Survival Rate di produksi rotifer dan pemeliharaan Larva kakap putih	Melakukan kontrol laboratorium terhadap kondisi cel fitoplankton, bila banyak cel yang terkontaminasi dilakukan inokulasi bibit baru pada kultur fitoplankton skala massal
12 Diseminasi teknologi pembesaran ikan Satker BPBAP Ujung Batee	300	Orang	-	-	Tidak terdapat target capaian kegiatan diseminasi teknologi pembesaran ikan pada Triwulan I tahun 2025 sehingga belum ditemukan permasalahan.	Koordinasi dan komunikasi dengan eselon I dan mengoptimalkan sumber dana yang ada
13 Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee	84	Nilai	-	-	Keaktifan personil, dan kesadaran pemahaman terhadap SAKIP.	Mengoptimalkan sumber daya, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan monitoring pelaksanaan, serta mengambil keputusan yang tepat.
14 Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee	81	Indeks	-	-	Diklat fungsional terbatas, diklat 20 JP belum beragam, anggaran yang belum maksimal.	Mengoptimalkan sumber daya, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan monitoring pelaksanaan, serta mengambil keputusan yang tepat.
15 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Ujung Batee	100	Persen	-	-	Selama triwulan pertama 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.	Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
16 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee	85	Persen	85	92,86	Selama triwulan pertama 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.	Mempertahankan komitmen untuk segera melakukan tindak lanjut dan meningkatkan komunikasi dengan Ijen.
17 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBAP Ujung Batee	76	Nilai	-	-	Selama triwulan pertama 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.	Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pembangunan zona integritas sesuai ekspektasi.
18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee	92,00	Nilai	-	-	Adanya pemblokiran anggaran mengakibatkan beberapa komponen IKPA akan tidak maksimal, seperti deviasi maupun serapan anggaran.	Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi nilai IKPA serta koordinasi/komunikasi dengan KPPN/ Kanwil DJPb agar kendala pelaksanaan anggaran dapat segera ditindaklanjuti.
19 Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee	71,50	Nilai	-	-	Capaian output (RO) tidak sebanding realisasi anggaran, sehingga terjadi realiasi anggaran sudah maksimal tetapi realiasi RO masih rendah.	Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar NKPA tercapai optimal.
20 Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee	3	Indeks	-	-	Pegawai yang diusulkan untuk pencantuman gelar akademik belum disetujui.	Mengusulkan kembali pencantuman gelar akademik. Koordinasi dan komunikasi dengan Tim Kerja Kepegawaian DJPB.
21 Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee	80	Nilai	-	-	Selama triwulan pertama 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.	Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelayanan keterbukaan informasi publik sesuai ekspektasi.
22 Persentase layanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee	80	Persen	80	100	Selama triwulan pertama 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.	Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelayanan perkantoran sesuai ekspektasi.
23 Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee	70	Nilai	-	-	Belum adanya pejabat fungsional arsiparis.	Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelayanan perkantoran sesuai ekspektasi.
24 Persentase penyelesaian SOP Satker BPBAP Ujung Batee	65	Persen	-	-	Selama triwulan pertama 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.	Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar penyelesaian SOP sesuai ekspektasi.



Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di triwulan berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang optimal;
2. Memperkuat koordinasi dengan instansi pusat maupun instansi lain, khususnya pada pelaksanaan kegiatan yang akan berpengaruh pada capaian indikator kinerja;
3. Monitoring dan evaluasi melalui rapat pengendalian rutin pada setiap minggu pertama bulan berjalan, dengan harapan dapat diambil rencana aksi dan dilakukan tindak mengatasi kendala-kendala.

Aquaculture is future



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Jalan Laksamana Malahayati Km. 16 Ujung Batee, Masjid Raya, Kab Aceh Besar, Prov Aceh

Telepon : 08116811448 | email : tu.bbapub@gmail.com

<https://kkp.go.id/djpb/bpbapujungbatee>